

## **PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2012**

**Hendro Ekwarso**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau  
Kampus Binawidya Jln. HR Subrantas Km 12.5 Pekanbaru 28293

### **ABSTRACT**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012. Kinerja pembangunan diukur berdasarkan agenda pembangunan daerah yang terdiri dari pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM yang sehat terdidik dan terlatih, percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan investasi daerah, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Metode yang digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja adalah dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 sebesar 77,14%. Capaian kinerja agenda pembangunan tertinggi pada pengentasan kemiskinan yaitu 95,66%, dan terendah pada agenda pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu 62,47%. Capaian agenda peningkatan SDM yang sehat terdidik dan terlatih sebesar 81,10%, dan percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan investasi daerah yaitu 79,12%, serta peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebesar 67,33%.*

*Keyword: Kinerja pembangunan daerah, kemiskinan, infrastruktur, SDM, pelayanan publik.*

## I. PENDAHULUAN

Visi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam jangka menengah periode 2010-2015 yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya “Indragiri Hulu Sejahtera Tahun 2015”. Visi tersebut dicapai melalui beberapa misi yaitu *pertama* mewujudkan daya saing daerah, *kedua* mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, ketiga mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, *keempat* mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya, *kelima* mewujudkan daerah yang memiliki peran pada tingkat regional.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah 2010-2015, ditetapkan lima agenda utama pembangunan daerah tahun 2010-2015, *pertama* pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, *kedua* penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang demokratis, *ketiga* pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, *keempat* terciptanya kehidupan aman, damai dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya, *kelima* penguatan peran daerah dalam lingkungan regional. Agenda pertama dengan tujuan (1) Memperkuat perekonomian daerah, (2) Membangun sumberdaya manusia yang bermutu (3) Membangun infrastruktur, (4) Membangun aparatur dan mereformasi birokrasi. Agenda ke dua dengan tujuan (1) Penegakan Hukum (2) Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas (3) Pembangunan budaya politik. Agenda ketiga dengan tujuan (1) Pemerataan pembangunan (2) Kemandirian daerah (3) Penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak. Agenda keempat dengan tujuan (1) Penciptaan suasana kehidupan dan lingkungan yang kondusif. (2) Pembangunan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, (3) Pengembangan nilai-nilai budaya melayu. Agenda kelima dengan tujuan (1) Mengembangkan kerjasama regional, (2) Meningkatkan investasi dari luar Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah perlu melakukan intervensi dan mengarahkan perekonomian untuk mencapai visi yang akan diwujudkan. Sistem ekonomi pasar tidak sepenuhnya mampu menyediakan seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan dan menjawab terjadinya eksternalitas. Dalam rangka menyediakan perlindungan sosial untuk mengurangi resiko kemiskinan di usia tua, resiko kesehatan, dan resiko pengangguran dalam jangka waktu lama, disini peran pemerintah menjadi penting.

Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tahun 2012 prioritas pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi Pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian serta pembangunan perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat, Peningkatan sumber daya manusia yang sehat, terdidik dan terlatih serta mengedepankan nilai-nilai moral, Percepatan penyediaan infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah, pengembangan investasi serta pengembangan wilayah, Peningkatan dan pengembangan aparatur serta reformasi birokrasi. prioritas pembangunan 2012 tersebut dicapai melalui lima sasaran yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM yang sehat, terdidik dan terlatih, percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan investasi daerah, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kita perlu belajar dari Jepang untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Menurut Gedeona (2009), pembelajaran yang perlu diambil dari Jepang adalah bahwa *pertama*, mereka melakukan proses desentralisasi secara sistematis dan terencana. *kedua*, realisasi untuk mewujudkan kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, meliputi *sharing of power* antara pemerintah pusat dan daerah, menciptakan peluang untuk menggali potensi penerimaan yang bersumber dari daerahnya sehingga *fiscal capacity*nya dapat terbentuk.

Pada tahun 2012, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tersebut telah dilaksanakan dengan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap rupiah yang dibelanjakan tersebut haruslah memiliki ukuran kinerja yang jelas, bukan hanya diukur dari seberapa besar dana yang telah dihabiskan tapi juga harus bisa diukur capaian Kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pusat Statistik, dan lembaga/instansi lainnya.

### E. Metode Analisis

Dalam menganalisis capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi. Indikator setiap sasaran yang digunakan dalam analisis ini meliputi :

Sasaran	Indikator
Pengentasan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka pengangguran</li> <li>2. Tingkat partisipasi angkatan kerja</li> <li>3. Angka pertumbuhan penduduk</li> <li>4. Jumlah produksi ikan</li> <li>5. Persentase keluarga tani yang menjadi kelompok tani mandiri</li> <li>6. Peningkatan Kualitas UMKM</li> <li>7. Angka Produksi padi</li> <li>8. Angka produksi ternak sapi</li> <li>9. Angka Produksi kelapa sawit</li> <li>10. Angka Produksi Karet</li> <li>11. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social</li> <li>12. Persentase masyarakat kawasan transmigrasi yang mandiri</li> </ol>
Peningkatan SDM yang sehat, terdidik dan terlatih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata kelulusan ujian nasional</li> <li>2. Angka Putus sekolah</li> <li>3. APM SD/MI</li> <li>4. APM SMP/MTs</li> <li>5. APM SMA/SMK/MA</li> <li>6. APK SD/MI</li> <li>7. APK SMP/MTs</li> <li>8. APK SMA/SMK/MA</li> </ol>

Sasaran	Indikator
	9. Persentase Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan 10. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 11. Cakupan peserta KB Aktif 12. Tingkat pertolongan persalinan oleh Bidan 13. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk 14. Prevalensi TB semua kasus 15. Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan JAMKESMAS/DA
Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Investasi Daerah	1. Kenaikan nilai realisasi PMDN 2. Persentase panjang jalan aspal kabupaten dalam kondisi baik 3. Tingkat elektrifikasi 4. Laju pertumbuhan PDRB 5. Tersedianya jaringan irigasi 6. Persentase jumlah persetujuan investasi
Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase kerugian negara/daerah yang telah disetor ke kas daerah 2. Persentase tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil Pemeriksaan 3. Jumlah posyantek aktif 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 5. Tingkat kepemilikan KTP 6. Tingkat kepemilikan akte kelahiran 7. Opini BPK terhadap LKPD 8. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 9. Rasio rumah ber-IMB
Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 2. Jumlah izin penampungan sementara limbah B3 3. Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kinerja capaian masing-masing indikator diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi Indikator } i}{\text{Target Indikator } i} \times 100$$

Selanjutnya untuk mengukur kinerja capaian dari setiap sasaran digunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Capaian Sasaran} = \frac{\sum \text{Kinerja capaian indikator}}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Seluruh capaian kinerja sasaran tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya sasaran maka akan diperoleh kinerja pembangunan daerah kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan sektor primer. Mengingat sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Taryono (2010), perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011 masih didominasi oleh sektor primer. Walaupun demikian sektor industri mulai berkembang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah yang lebih besar dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Prospek ekonomi yang baik tersebut diharapkan akan diikuti tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang semakin merata dan tingkat kemiskinan penduduk yang semakin menurun. Pada tahun 2012 target pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka menanggulangi kemiskinan meliputi kependudukan dan ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas pertanian, penanganan masalah kesejahteraan sosial, dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Realisasi indikator pengentasan kemiskinan yang melebihi dari target meliputi angka pengangguran yang ditargetkan 883 orang terealisasi sebanyak 618 orang atau capaian kinerjanya 142,88%. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ditargetkan 10.000 jiwa, terealisasi sebanyak 14.477 jiwa atau capaian kinerjanya sebesar 144,77%. Produksi perkebunan karet yang ditargetkan 450.000 ton, terealisasi sebesar 453.369,81 ton atau capaian kinerjanya 100,75%.

Indikator kinerja sasaran pengentasan kemiskinan yang capaian kerjanya relatif rendah antara lain angka pertumbuhan penduduk, produksi ikan, pengembangan kawasan transmigrasi. Angka pertumbuhan penduduk ditargetkan sebesar 15% namun tercapai sebesar 25,68% atau capaian kerjanya sebesar 58,41%. Produksi ikan yang ditargetkan sebesar 10 ton hanya terealisasi sebesar 7,236 ton atau capaian kerjanya sebesar 72,36%. Masyarakat transmigrasi yang mandiri ditargetkan 45.782 KK terealisasi sebanyak 37.176 KK atau capaian kerjanya sebesar 81,20%.

Tabel 1: Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Angka pengangguran	Orang	883	618	142,88
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja	Orang	25.000	21.202	84,81
3. Angka pertumbuhan penduduk	%	15	25,68	58,41
4. Jumlah produksi ikan	Ton	10	7,236	72,36
5. Persentase keluarga tani yang menjadi kelompok tani	Kel Tani	560	483	86,25
6. Peningkatan Kualitas UMKM	Unit	16.716	15.044	90,00
7. Angka Produksi padi	Ton	45.000	42.654,64	94,79
8. Angka produksi ternak				
- Ternak Sapi	Ekor	30.000	28.709	95,70
- Ternak Unggas	Ekor	9.000.000	8.401.218	93,35
9. Angka Produksi Perkebunan				
- Kelapa Sawit	Ton	300.000	294.952,87	98,32
- Karet	Ton	450.000	453.369,81	100,75
10. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jiwa	10.000	14.477	144,77
11 Persentase masyarakat kawasan transmigrasi yang mandiri	KK	45.782	37.176	81,20
Rata-rata kinerja capaian sasaran pengentasan kemiskinan				95,66

Sumber : LAKIP Kabupaten Indragiri Hulu 2012

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Riau sehingga memiliki kemampuan kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan dengan daerah bukan penghasil migas. Dana yang relatif besar tidak akan efektif dan efisien dalam menanggulangi kemiskinan bila alokasinya tidak tepat sasaran. Penelitian Taryono (2012). Menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata aloksi belanja langsung antara kabupaten/kota penghasil migas dengan bukan penghasil migas, tidak menyebabkan kinerja penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota penghasil migas lebih baik dari kabupaten/kota bukan penghasil migas. Kondisi ini juga ditunjukkan dari kinerja capaian pada tahun 2012 dalam rangka penanggulangan kemiskinan sebesar 95,66%.

Ketergantungan daerah terhadap pusat terutama dari dana perimbangan menyebabkan daerah kurang kreatif dan inovatif. Ahmad (2011), ketergantungan fiskal ditengarai sebagai salah satu penghalang keberhasilan pembangunan pasca pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan daerah kurang berkembang dan masyarakatnya tetap terjebak dalam kemiskinan karena pola usahanya masih tradisional. Hasil penelitian Febrina dan Liana (2008) menunjukkan pada umumnya peternak di Kecamatan Rengat Barat beternak masih bersifat tradisional, beternak hanya sebagai tabungan dan sistem pemeliharaan secara semi intensif

Di bidang perkebunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2012 menargetkan produksi kelapa sawit 300.000 ton dan karet sebanyak 450.000 ton. Dari target tersebut yang mampu direalisasikan pada tahun 2012 untuk produksi kelapa sawit sebanyak 294.952,87 ton dan karet sebanyak 453.369,81 ton. Dengan demikian capaian kinerja produksi kelapa sawit sebesar 98,32% dan karet sebesar 100,75%. Berdasarkan penelitian Syahza (2011) menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka multiplier effect sebesar 3,03, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Indek kesejahteraan petani di pedesaan tahun 2003 sebesar 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pada periode tahun 2003-2006 indik kesejahteraan petani 0,18 dan periode tahun 2006-2009 juga mengalami positif sebesar 0,12. Ini berarti kesejahteraan petani pada periode tersebut meningkat sebesar 12 persen.



Kinerja pembangunan sumberdaya manusia antara lain dapat dilihat dari aspek pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2012 indikator kinerja pendidikan diukur dengan indikator rata-rata kelulusan ujian nasional dengan target 100%, angka putus sekolah dengan target 2.660 orang, APM dan APK untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 100%. Di bidang kesehatan indikator kinerja yang digunakan meliputi persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan target seluruhnya mendapat perawatan atau 100%, target cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 100%, cakupan peserta KB aktif dengan target 100%, tingkat pertolongan persalinan oleh bidan ditargetkan sebesar 100%, angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk sebesar 0, prevalensi TB 0 kasus, dan jumlah pasien mendapat layanan kesehatan dengan menggunakan JAMKESMAS/DA sebesar 100%.

Tabel 2 : Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan SDM Yang Sehat, Terdidik dan Terlatih Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Rata-rata kelulusan ujian nasional	%	100	100	100,00
2. Angka Putus sekolah	Orang	2.660	1.660	62,41
3. APM SD/MI	%	100	100	100,00
4. APM SMP/MTs	%	100	100	100,00
5. APM SMA/SMK/MA	%	100	100	100,00
6. APK SD/MI	%	100	100	100,00
7. APK SMP/MTs	%	100	100	100,00
8. APK SMA/SMK/MA	%	100	100	100,00
9. Persentase Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100,00
10. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100	84	84,00
11. Cakupan peserta KB Aktif	%	100	73,39	73,39
12. Tingkat pertolongan persalinan oleh bidan	%	100	90	90,00
13. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk	Kasus	0	187	18,70
14. Prevalensi TB semua kasus	Kasus	0	137	13,70
15. Jumlah pasien yang mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan jamkesmas/da	%	100	74,3	74,30
Rata-rata kinerja capaian sasaran peningkatan SDM yang sehat, terdidik dan terlatih				81,10

Sumber : LAKIP Kabupaten Indragiri Hulu, 2012

Agenda pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu yang ke tiga adalah penyediaan infrastruktur pemukiman yang layak. Menurut Howard (2010), unit-unit organisasi baru di tingkat pemerintah daerah yang menyelenggarakan layanan infrastruktur telah diberi otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar, berpotensi untuk meningkatkan penyediaan layanan dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui ke mana larinya uang retribusi yang mereka bayarkan. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas juga akan mendorong peningkatan kegiatan investasi di daerah, karena tersedianya infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi investasi biaya tinggi. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu mendorong kemandirian fiskal dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur dari waktu ke waktu terus mampu ditingkatkan. Menurut Prasetyia (2011) kemandirian fiskal berkorelasi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya sangat tergantung pada perumusan kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Tabel 3 : Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Investasi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Kenaikan nilai realisasi PMDN	%	100	100	100,00
2 . Persentase panjang jalan aspal kabupaten dalam kondisi baik	%	100	20,74	20,74
3 Tingkat elektrifikasi	%	80	65	81,25
4 Kontribusi Sektor PDRB				
- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Rp. (000)	2.000.000.000	1.898.211.160	94,91
- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Rp. (000)	500.000.000	482.616.080	96,52
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Rp. (000)	1.000.000.000	722.036.000	72,20
5. Tersedianya jaringan Irigasi	Ha	2.000	1.439	71,95
6 .Jumlah persetujuan investasi	Prsh	5	3	60,00
Rata-rata				79,12

Sumber : LAKIP Kabupaten Indragiri Hulu, 2012

Pembangunan infrastruktur dapat juga dilihat sebagai salah satu alternatif pemulihan pertumbuhan ekonomi, dimana Pembangunan kembali infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat (Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2009)

Dari indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja infrastruktur dan pengembangan investasi di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2012 yang capaiannya mencapai 100% hanya indikator kenaikan nilai realisasi PMDN. Namun demikian dari 5 perusahaan yang ditargetkan hanya 3 perusahaan yang dapat direalisasikan mendapat persetujuan investasi. Faktor yang menghambat masuknya kegiatan investasi tersebut antara lain kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hulu yang masih dalam kondisi rusak. Pemerintah pada tahun 2012 telah menargetkan seluruh jalan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam kondisi baik (100%) namun hanya mampu direalisasikan sebesar 20,74%. Kondisi ini tentunya akan menghambat laju perkembangan ekonomi daerah. Meningkatnya kegiatan investasi akan mendorong meningkatnya kebutuhan energi terutama listrik. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat elektrifikasi di Kabupaten Indragiri Hulu dengan menargetkan tingkat elektrifikasi pada tahun 2012 sebesar 80%. Namun demikian dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan baru meningkatkan elektrifikasi di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 65% atau capaian kinerjanya sebesar 81,25%.

Penyelenggaraan barang dan jasa publik secara langsung merupakan tanggung jawab utama pemerintah karena ciri utama dari barang dan jasa publik itu sendiri yang menyangkut kepentingan masyarakat luas (Swaramarinda dan Indriani, 2011). Dari indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja peningkatan pelayanan publik dan reformasi pada tahun 2012. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah pada indikator jumlah posyantek aktif yaitu 100%. Capaian indikator kinerja terendah adalah pada indikator penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu 5%, dimana dari 100% target yang ditetapkan hanya tercapai 5%. Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi sebesar 67,33%.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi pada tahun 2012 di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi persentase kerugian negara/daerah yang telah disetor dengan target 100%, namun hanya terealisasi sebesar 83,03%. Persentase tindak lanjut SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditargetkan 100% hanya terealisasi sebesar 74,82%. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diharapkan sebesar 100% hanya mampu terealisasi sebesar 91,31%. Tingkat kepemilikan KTP pada tahun 2012 yang ditargetkan sebesar 100% baru terealisasi 70,9% atau kinerjanya pada tahun 2012 sebesar 70,90%. Sedangkan tingkat kepemilikan akte kelahiran yang ditargetkan 100% baru terealisasi sebesar 77,98%.

Tabel 4 : Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase kerugian negara/daerah yang telah disetor ke kas Daerah	%	100	83,03	83,03
2. Persentase tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	100	74,82	74,82
3. Jumlah posyantek aktif	Kec	14	14	100,00
4. indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	%	100	91,31	91,31
5. Tingkat Kepemilikan KTP	%	100	70,9	70,90
6. Tingkat Kepemilikan Akte Kelahiran	%	100	77,98	77,98
7. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	100	5	5,00
8. Rasio rumah ber-IMB	Bangunan	1:1000	1:1356	35,60
Rata-rata				67,33

Capaian kinerja sasaran pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2012 rata-rata sebesar 62,47%. Capaian kinerja tersebut didasarkan pada target indikator yang telah ditetapkan. Target indikator cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% terealisasi sebesar 85%, target jumlah izin penampungan sementara limbah B3 sebesar 100% hanya mampu direalisasikan sebesar 42,4%, dan luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditargetkan 100% hanya mampu direalisasikan sebesar 60%.

Tabel 5 : Target dan Realiasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	100	85	85,00
2. Jumlah izin penampungan sementara limbah B3	%	100	42,4	42,40
3. Luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	100	60	60,00
Rata-Rata				62,47

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 sebesar 77,14%. Kinerja tersebut di ukur berdasarkan capaian lima agenda pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan (95,66%), peningkatan SDM yang sehat terdidik dan terlatih (81,10%), percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan investasi daerah (79,12%), peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi (67,33%), dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (62,47%). Berdasarkan capaian dari lima agenda tersebut menunjukkan bahwa capaian tertinggi yaitu pada agenda pengentasan kemiskinan dan capaian terendah agenda pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## B. Saran

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 yang baru mencapai sebesar 77,14% terutama disebabkan dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya mampu untuk direalisasikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya dana, sumberdaya manusia, teknologi, dan sistem kelembagaan yang masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan APBD yang tepat waktu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad I, 2011. Reginal Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. *Economic Journal Of Emerging Market* Agustus 2011 3 (2) 189-198
- Febrina D Dan Liana M, 2008. Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Pakan Ruminansia Pada Peternak Rakyat Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Peternakan* Vol 5 No 1 Februari 2008 (28 – 37) Issn 1829 – 8729
- Howard D, 2010. Konsep yang Menjanjikan untuk Penyelenggaraan Layanan Daerah. *Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia*. Edisi 3 | Juli 2010
- Prasetyia F, 2011. Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi. *Journal Of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 141-156
- Syahza A, 2011. Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, Hlm.297-310*
- Taryono, 2010. Prospek Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun I, No.1 November 2010*
- Taryono, 2012. Analisis Belanja Daerah Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Antara Kabupaten/Kota Penghasil Migas Dan Bukan Penghasil Di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan Tahun III No. 7, November 2012 : 52 -70*
- Gedeona H. T, 2009. Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia dan Jepang *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume VI No. 2 Juni 2009
- Swaramarinda D R dan Indriani S, 2011. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Econo Sains* Volume IX No. 2 Agustus 2011 Hlm. 95-105